

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE DAN BELANJAPEMBINAAN KEMASYARAKATAN KUTE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti perubahan besaran Dana Alokasi Umum Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, perlu dilakukan perubahan besaran Alokasi Dana Kute Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penetapan Belanja Penyelenggaran Pemerintahan Kute dan Belanja Pembinaan Masyarakat Kute Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011-tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); sebagaiman telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 03);
17. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Kute (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 49 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 (Serita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penetapan Belanja Penyelenggaran Pemerintahan Kute dan Belanja Pembinaan Masyarakat Kute Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 (Serita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUSAHAN ATAS PERATURAN SUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE DAN SELANJA PEMSINAAN KEMASYARAKATAN KUTE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tentang Pedoman Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute Dan Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kute Dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 (Serita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

2. Ketentuan Lampiran II pada Pasal 9 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Jampiran II peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 24 Maret 2021

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 26 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 02.